

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Bambang Sucipto

STAINU Kebumen

Jl. Tentara Pelajar No. 25 Kebumen, Jawa Tengah

e-mail : toif_chas@yahoo.com

Abstract

Education and social change influence each other, so that a broad impact on society. Education is an institution that can serve as agents of social change and also to determine the direction of social change. Social change is a necessary thing to happen, sooner or later, the changes are positive or negative or other changes. Change is something that we should be grateful at the same time we are aware of because of the changes that will positively impact provide progress and prosperity for mankind, whereas negative changes on the contrary, that destroy human civilization. Islamic educational institutions must be vigilant against the negative effects of social change. Do not let the educational institutions are not ready to sacrifice the learners. Technological advances brought by contemporary civilization, it must be controlled by the stakeholders of educational institutions. This paper will discuss the response of Islamic educational institutions to social change. Keywords: institutions, education, Islam, change, social.

Abstrak

Pendidikan dan perubahan sosial saling mempengaruhi, sehingga berdampak luas di masyarakat. Pendidikan adalah lembaga yang dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial dan sekaligus menentukan arah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah hal yang niscaya terjadi, cepat atau lambat, perubahan yang bersifat positif atau negatif atau perubahan lainnya. Perubahan adalah sesuatu yang patut kita syukuri sekaligus kita waspadai karena perubahan yang bersifat positif akan berdampak memberikan

kemajuan dan kesejahteraan bagi umat manusia, sedangkan perubahan negatif justru sebaliknya, yakni menghancurkan peradaban manusia. Lembaga pendidikan Islam harus bersikap waspada terhadap efek negatif dari perubahan sosial. Jangan sampai lembaga pendidikan tidak siap lalu mengorbankan para peserta didiknya. Kemajuan teknologi yang diusung oleh peradaban manusia kontemporer, maka harus dikuasai oleh para *stakeholder* lembaga pendidikan. Tulisan ini akan membahas mengenai respon lembaga pendidikan Islam terhadap perubahan sosial.

Kata kunci : lembaga, pendidikan, Islam, perubahan, sosial.

Pendahuluan

Pendidikan yang dalam Islam berarti proses *tilawah, tazkiah dan ta'dib* adalah proses untuk merubah setiap peserta didik menjadi lebih baik. Perubahan peserta didik yang dilakukan secara bersama-sama tentu akan berdampak pada perubahan sosial, keduanya saling bertautan satu dengan yang lain. Begitu pula perubahan sosial akan sedikit banyak merubah pola-pola yang digunakan dalam pendidikan. Pendidikan dan perubahan sosial saling mempengaruhi, sehingga berdampak luas di masyarakat. Pendidikan adalah lembaga yang dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial (*social agent of change*) dan sekaligus menentukan arah perubahan sosial. Sedangkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat setiap kalinya dapat direncanakan dengan arah perubahan yang ingin dicapai. Namun perubahan sosial juga dapat terjadi setiap saat tanpa harus direncanakan terlebih dahulu disebabkan pengaruh budaya dari luar.

Pendidikan mempengaruhi masyarakat yang pada akhirnya terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial sebagai bentuk inovasi yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia yang bertujuan meningkatkan kemakmuran. Berbagai konsep perubahan sosial disodorkan para ahli dalam menganalisis fenomena tersebut yaitu, konsep kemajuan sosial, konsep sosialistik, konsep perubahan siklus, teori sejarah, teori partikularistik, teori sosiologi serta sosiologi dan perubahan sosial.

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam hidup manusia karena memberikan kemajuan pemikiran umat manusia, sehingga manusia akan

terus meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu pendidikan terbentuk menjadi suatu sistem. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Undang-Undang Sisdiknas pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui 3 jalur yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan ini satu sama lain saling berkait dan membutuhkan untuk melakukan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kelak. Selain ketiga jalur tersebut anak-anak Indonesia wajib menempuh pendidikan “wajib belajar 9 tahun”, sebagai program pemerintah dalam meningkatkan SDM masyarakat Indonesia.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, terus berbenah menghadapi segala perubahan global, baik yang mempengaruhi sistem nilai ataupun dalam bidang teknologi. Ini semua tidak dapat dicapai begitu saja jika lembaga pendidikannya berhenti berpikir dan berkembang maka tentulah pendidikan akan statis dan jumud. Akibatnya tugas mendidik anak akan diambil alih oleh media-media informasi, jejaring sosial, atau situs-situs dalam internet. Memang akan banyak informasi yang mereka dapatkan, tetapi tanpa bimbingan dan arahan, anak didik akan menjadi liar dan tak terarah. Jika tak ada bimbingan dan arahan guru, maka akan muncul generasi yang memiliki banyak akses pengetahuan namun sesat arah. Generasi yang saling bermusuhan dan generasi-generasi lain yang bertindak tanpa terikat oleh tata nilai dan norma. Ini adalah perubahan sosial yang bisa terjadi apabila lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, lalai dalam melakukan perubahan internal.

Respon Lembaga Pendidikan terhadap Perubahan

Pendidikan adalah proses yang terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk

menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan harus dilaksanakan secara terencana dan terstruktur, agar pengetahuan dan ketrampilan yang didapat oleh peserta didik bisa lebih direncanakan dan terukur. Lembaga yang melakukan ini adalah lembaga pendidikan. Pada saat kita berbicara dengan tata nilai adiluhung, maka kita tidak dapat terlepas dari tata nilai yang tersusun oleh sebuah tatanan agama, karena agama inilah sumber tata nilai yang sesungguhnya. Adapun tata nilai yang disandarkan pada kelompok kedaerahan atau letak geografis, maka tata nilainya akan mudah berubah dan relatif tidak bertahan lama dikarenakan tidak adanya sifat kesakralan, baik tidak adanya Nabi ataupun kitab suci yang menyatukan mereka dalam memahami berbagai masalah dalam kehidupan.

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia saat ini didominasi oleh pesantren dan madrasah. Sistem yang digunakan di pesantren memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya, yaitu:

1. Memakai sistem tradisional.
2. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi.
3. Para santri terbebas dari capaian-capaian simbolik, seperti mengejar gelar dan ijazah.
4. Sistem pendidikan yang mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian hidup.
5. Sistem pendidikan di pesantren mengarahkan para murid untuk dapat hidup mandiri (Dhofier, 1994 : 16-24).

Jika ditelaah lagi, maka pendidikan pesantren yang merupakan pendidikan yang pola-polanya sudah diselenggarakan sejak sebelum kemerdekaan, bahkan sebelum adanya format sekolah seperti yang digagas oleh Snouck Hurgronje yang kemudian sampai saat ini masih digunakan di Indonesia, maka pesantren membutuhkan beberapa sentuhan perubahan. Perubahan yang paling dibutuhkan dalam pendidikan di pesantren terutama meliputi :

1. Bidang personalia. Dalam hal ini maka dibutuhkan peningkatan mutu guru, sistem kepegangatan, manajerial kependidikan, dan lain sebagainya.

2. Fasilitas fisik, dalam hal ini maka sentuhan teknologi dibutuhkan dalam perbaikan mutu pesantren di masa yang akan datang.
3. Perencanaan waktu. Hal ini penting dalam mengatur waktu belajar, perubahan jadwal pelajaran dan lain-lain (Yasmadi, 2002).

Dalam hal persiapan lembaga pendidikan dalam menyongsong perubahan sosial, maka salah satunya adalah melakukan *up-grading* dalam hal tenaga pengajar. Ada beberapa kompetensi yang harus diperhatikan ditingkatkan, diantaranya:

1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansi, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa dalam berbagai potensinya.
2. Kompetensi pribadi, di mana guru adalah pusat perhatian siswa terhadap sosok pribadi yang ideal.
3. Kepribadian profesional.
4. *Skill* teknologi. *Skill* yang baik dalam penggunaan teknologi akan membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan guru pun akan lebih mudah untuk mengakses bahan pembelajaran untuk disampaikan pada murid.

Dalam memasuki abad ke-21 atau milenium ke-3 keadaan dunia ditandai oleh berbagai perkembangan baru yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ada beberapa kecenderungan yang mewarnai kehidupan yang akan datang, sebagaimana dikutip dari Mochtar Bukhari oleh Abudin Nata (2006 : 91-97), yaitu :

1. Kecenderungan untuk berintegrasi dalam kehidupan ekonomi, dan kecenderungan untuk berpecah-belah dalam kehidupan politik.
2. Kecenderungan kehidupan larutnya manusia dalam arus negatif globalisasi, seperti narkoba, masalah lingkungan serta masalah pertumbuhan penduduk.
3. Kecenderungan akan adanya perubahan secara radikal terhadap situasi dalam pasar tenaga kerja.
4. Kecenderungan penggunaan teknologi tingkat tinggi.
5. Kecenderungan lahirnya gaya hidup baru yang mengandung eks-

ekses tertentu seperti pornografi, penggunaan senjata api, alat-alat *microelectronic* untuk melakukan kejahatan dan lainnya.

Perubahan-perubahan sosial di atas perlu menjadi perhatian dalam rangka mencegah agar efek negatif yang timbul bisa diminimalisir se-sedikit mungkin, karena untuk mengatakan menghilangkannya dirasa tidak mungkin. Dunia pendidikan harus merumuskan cara yang paling tepat untuk melaksanakan strategi yang akan dipilih. Hal ini berarti antara lain dunia pendidikan harus meningkatkan kemampuannya untuk menampung, menyimpan, menganalisa segenap informasi yang masuk. Setelah terkumpul maka informasi ini harus dilakukan penyerapan makna sehingga dapat membuat dunia pendidikan benar-benar tahu (*becoming knowledgeable*) mengenai apa yang sedang dihadapi dan mampu menghadapinya secara arif.

Pendidikan masa depan yang harus diberikan kepada setiap generasi muda adalah pendidikan yang memiliki visi global dan visi otonomi daerah. Dengan visi global ini pendidikan harus memiliki standar mutu yang diakui oleh dunia internasional, sehingga para lulusannya bukan hanya dapat bekerja di dalam negeri melainkan juga bekerja di luar negeri. Lulusan yang demikian itu pada gilirannya dapat diterjunkan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan tugas utamanya memajukan daerah dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, budaya, ekonomi, teknologi dan sebagainya.

Lembaga pendidikan Islam dalam mempersiapkan perubahan sosial dan visi global di atas, maka harus melakukan demokratisasi pendidikan yang berupa:

1. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
2. Melaksanakan konsep pendidikan untuk semua (*education for all*).
3. Melakukan pemberdayaan dan pendayagunaan berbagai institusi kemasyarakatan.
4. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri (Nata, 2006 : 106).

Sebagai perbandingan, lembaga pendidikan di Mesir dalam menyongsong perubahan sosial melakukan banyak perubahan, diantaranya adalah dalam bidang materi dan kurikulum (Mukti, 2008 : 197). Dalam hal perbaikan kurikulum, maka jika ada ilmu atau pengetahuan baru

yang muncul dan belum ada di Mesir, maka pemerintah sebagai penanggung jawab utama pendidikan nasional melakukan kebijakan untuk menerjemahkannya. Diantara buku-buku yang diterjemahkan di era kontemporer ini antara lain yang mengenai filsafat, biografi, logika, geografi, politik dan antropologi.

Dalam menyongsong perubahan sosial, maka lembaga pendidikan di Indonesia harus melakukan perbaikan dalam hal manajemen, diantaranya adalah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Dalam MBS, aspek yang menjadi perhatian utamanya adalah sebagai berikut:

1. Manajemen kurikulum dan program pengajaran.
2. Manajemen tenaga pendidikan.
3. Manajemen kesiswaan.
4. Manajemen keuangan dan pembiayaan.
5. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan.
6. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat (Arief, 2005 : 68-71).

Dalam suatu perubahan tidak terhindarkan tantangan-tantangan (*challenge*), persoalan-persoalan, dan goncangan akan terus berlangsung sebelum perubahan itu berhasil. Ada beberapa fungsi pendidikan yang berhubungan dengan perubahan sosial di masyarakat, yaitu:

1. Fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial.
2. Fungsi memindahkan nilai-nilai budaya (transformasi kebudayaan).
3. Fungsi mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial.

Dalam pola perubahan sosial, maka kita dapatkan paling sedikit ada dua model, yaitu model dialektik dan model siklus. Model dialektik dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Mengandung unsur perubahan linear dan siklus.
2. Perubahan yang signifikan berlangsung sebagai upaya untuk memecahkan akumulasi kontradiksi yang tidak dapat ditoleransi.
3. Penguraian tekanan yang melekat pada kehidupan sosial.
4. Perubahan berulang jangka pendek dengan arah perubahan kumulatif jangka panjang.
5. Proses perubahan terjadi tapi konten perubahan berubah.

Sedangkan perubahan sosial dengan model siklus dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Perubahan merupakan siklus dan mengalami pengulangan (berulang); sebagaimana jatuh bangkitnya peradaban.
2. Argumen bahwa perubahan merupakan pengulangan sejarah dengan aspek terpenting pada proses seleksi.

Contoh pola perubahan dengan model siklus seperti siklus dinasti bisnis, siklus kehidupan kampus, dan siklus keluarga. Dalam menyikapi akan semakin majunya tata sosial serta semakin ketatnya persaingan dalam memperebutkan peluang kerja, sementara banyak penduduk yang putus sekolah, maka pendidikan informal harus lebih diintensifkan lagi. Pendidikan jenis ini memiliki makna bahwa seseorang yang tidak dapat menempuh pendidikan formal karena berbagai hal dapat menempuh jalur pendidikan nonformal dan akan memperoleh penghargaan yang sama dengan pendidikan formal setelah dilakukan penilaian sesuai dengan aturan yang mengacu pada standar nasional pendidikan (pasal 26:6 sisdiknas), karena pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti dari pendidikan formal. Dengan kata lain dikatakan sebagai (1) pelengkap karena mempunyai makna bahwa pendidikan sepanjang hayat berlaku kepada setiap warga negara, untuk selalu melengkapi pendidikan nonformal sebelumnya, (2) penambah karena seseorang yang sudah memperoleh pendidikan tertentu dapat menambah pendidikan dengan berbagai jenis yang ada dalam jalur pendidikan nonformal, dan (3) pengganti karena pendidikan tersebut menggantikan program pendidikan formal pada jenjang tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh peserta didik karena berbagai hal.

Dalam kaitannya bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pendidikan pengganti dari pendidikan formal, yaitu program untuk peserta didik yang berupa:

1. Program paket A (setara dengan pendidikan Sekolah Dasar).
2. Program paket B (setara dengan pendidikan SLTP).
3. Program paket C (setara dengan pendidikan SLTA).

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas kursus, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat, kelompok belajar, majelis taklim dan sebagainya. Selain itu pendidikan nonformal juga memiliki berbagai jenis kegiatan untuk warga belajar seperti, pendidikan anak terlantar, pendidikan

tuna warga, pendidikan wanita tuna susila, penyuluhan remaja, pendidikan khusus korban narkotik, pendidikan khusus dalam penjara, dan sebagainya. oleh sebab itu pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sebagai bekal kehidupan mereka kelak dan mampu serta siap menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari fenomena-fenomena yang mereka lakukan dan terjadi tanpa perencanaan dahulu. Ini dikarenakan lembaga-lembaga pendidikan disamping berfungsi sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi sebagai difusi budaya (*cultural diffusion*). Kebijakan-kebijaksanaan sosial yang kemudian diambil tentu berdasarkan pada hasil budaya dan difusi budaya. Sekolah-sekolah tersebut bukan hanya menyebarkan penemuan-penemuan dan informasi-informasi baru tetapi juga menanamkan sikap-sikap, nilai-nilai dan pandangan hidup baru yang semuanya itu dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan dorongan bagi terjadinya perubahan sosial yang berkelanjutan (<http://fungsipendidikandalamperubahansosial.blogspot.com/>).

Pesantren sebagai salah satu wujud lembaga pendidikan Islam harus berbenah menghadapi perubahan sosial yang begitu cepat. Dalam hal manajemen kepemimpinan dan SDM, Syukri Zarkasyi (2005 : 198) menjelaskan pentingnya peran kepemimpinan lembaga pendidikan berfungsi efisien. Ia mengatakan bahwa pimpinan pondok yang efektif adalah kyai mengatur, mengendalikan, menggerakkan, dan menggiatkan keseluruhan totalitas kehidupan pondok, baik ke luar atau ke dalam. Sebab nilai yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan para santri, guru, dan segenap warga pondok yang didasari oleh jiwa dan falsafah hidup pondok itulah yang mendidik. Bukan hanya pelajaran di kelas dan ceramah-ceramah saja, melainkan seluruh totalitas kehidupan itulah yang mendidik. Dari sinilah tercipta lingkungan masyarakat belajar dan dari situ pula *mental attitude* akan tertanam. Pendidikan itu bukan hanya melalui pengajaran semata, melainkan lewat pengarahan, penugasan serta pembiasaan dengan kebiasaan yang baik dan dengan *al-uswah al-hasanah*.

Dalam UU RI No. 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 13 dikemukakan bahwa pendidikan informal adalah jalur

pendidikan keluarga dan lingkungan. Sedangkan pada pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Menurut Combs (1973) pendidikan informal dikatakan sebagai suatu proses sepanjang hayat (*life long process*) bagi individu yang terkait dengan masalah pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang diperoleh dalam pengalaman hidup sehari-hari yang bersumber dari lingkungan, baik dari keluarga atau tetangga, tempat bekerja, tempat bermain, pasar, perpustakaan maupun dari media massa. Jadi pendidikan informal adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dalam keluarga atau pendidikan yang terselenggara di dalam lingkungan masyarakat baik disengaja dalam proses belajar atau berjalan dalam proses alami tanpa disengaja untuk belajar.

Karakteristik pendidikan informal antara lain tidak terancang, tidak terorganisir, tujuan tidak dinyatakan secara eksplisit namun proses pendidikan tetap berjalan sesuai dengan pola budaya dan falsafah hidup yang dianut dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat tempat mereka berada.

Pendidikan informal berbeda dengan pendidikan formal dan non-formal dilihat dari aspek tujuan, isi, waktu penyelenggaraan, sistem penyelenggaraan, dan sistem pengawasannya. Dari sudut tujuan, pendidikan informal tidak secara eksplisit tujuan disampaikan kepada warga belajar namun tersirat bahwa tujuan pendidikan memang dicanangkan secara komprehensif pada saat unit keluarga ingin membentuk norma keluarga. Dari sudut isi (*content*) atau materi bahan ajar, pendidikan informal mempunyai acuan normatif yang dikembangkan dari falsafah hidup keluarga yang umumnya berisi pola-pola budaya, nilai hidup yang ingin disampaikan kepada anak-anak mereka sebagai peserta didiknya. Di samping itu juga terdapat materi pembelajaran yang bersifat praktis sebagai bekal hidup setelah dewasa. Dari sudut waktu penyelenggaraan, pendidikan informal sangat fleksibel dan tidak terikat oleh waktu.

Dari sudut sistem penyelenggaraan, pendidikan informal terlaksana tanpa sistem, karena komponen sistem tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk komponen sistem, misalnya seorang fasilitator dalam proses pembelajaran pendidikan informal tidak terdapat kualifikasi secara jelas sebagai seorang fasilitator. Sedangkan dari segi sistem pengawasan,

pendidikan informal tidak memiliki lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya proses pendidikan tersebut. Pengawasan pendidikan dalam keluarga sangat tergantung pada tingkat keketatan atau kedisiplinan dalam keluarga tersebut.

Dalam hal pendidikan tinggi, Marwan Saridjo menyoroti tentang peran lembaga pendidikan tinggi Islam, dengan menganggap bahwa sudah saatnya dikotomi antara ilmu agama dan umum dihilangkan. Maka ke depan PTAI baik negeri maupun swasta diharapkan tidak hanya terlibat dalam pendidikan agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu umum. Fakultas dan jurusan keagamaan dibiarkan tetap ada tetapi harus ditambah dengan fakultas dan jurusan yang bersifat umum.

Pengertian Perubahan Sosial

Setiap inovasi merupakan pemanfaatan unsur-unsur budaya yang tidak dapat dipungkiri dan pelanggaran terhadap aspek-aspek *status quo* budaya. Sejarah mencatat bahwa yang diinginkan bukan sekedar perubahan tetapi lebih pada stabilitas. Masyarakat berusaha memelihara kontinuitas kehidupan sosial, baik dalam keadaan stabil maupun dalam proses perubahan sosial.

Perubahan sosial adalah perubahan untuk mencapai ketentraman sosial yang stabil. Stabilitas tidak hanya pada kondisi sosial yang ideal, tetapi juga pada kondisi normal. Menurut Zaltman dan Duncan menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah pembelajaran kembali individu atau kelompok sebagai reaksi terhadap adanya tuntutan aktivitas dalam situasi yang baru, yang menghasilkan perubahan baik, dalam bentuk dan atau fungsi sistem sosial.

Sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai pendapat/karya milik orang lain, orientasi masa depan, penduduk yang heterogen, serta sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Hal-hal tersebut merupakan faktor pendorong dalam perubahan sosial. Dalam pembahasan ini yang sangat mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah orientasi kehidupan ke masa depan sehingga memajukan sistem pendidikan agar dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru yang akhirnya mampu menggeser tatanan yang berlaku di masyarakat.

Macam-macam Konsep Perubahan Sosial

1. Konsep Kemajuan Sosial

Gagasan kemajuan sosial, menimbulkan keretakan yang tajam dengan pemikiran sosialis yang banyak dianut pada pertengahan abad ke 19 yang dikenal sebagai inovasi ideologi. Hal tersebut terkait dengan gagasan tradisional yang dipropagandakan pihak gereja bahwa kehidupan di dunia adalah penderitaan setelah menerima hukuman Tuhan diturunkan dari surga. Sedangkan gagasan kemajuan sosial berbeda bahwa kehidupan manusia ditemukan oleh manusia sendiri. Manusia membentuk masyarakat dan berusaha memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Gagasan kemajuan menyangkut banyak aspek, seperti rencana politik dan kehidupan yang lebih baik.

a. Evolucionisme

Gagasan memungkinkan masyarakat untuk berkembang melalui upaya yang hati-hati dalam satu bentuk atau yang lain dan mencakup berbagai segmen masyarakat seperti yang kita temukan saat ini. Hal ini merupakan basis ideologi pada berbagai upaya reformasi sosial, hukum dan lainnya.

b. Neo Evolucionisme

Para penganut neo evolusionisme percaya bahwa perubahan sosial tidak dapat terelakkan dan mereka berpendapat bahwa arah perubahan sosial adalah bentuk organisasi yang sederhana sangat berbeda, tetapi pada saat yang sama sangat terpadu yang menjadi karakteristik masyarakat modern.

2. Konsep Sosialistik Mengenai Perubahan

Evolucionisme cenderung mendominasi pikiran sosial abad 19 sampai abad ini; tetapi hal tersebut sering kali digabungkan dengan konsep kemajuan melalui tindakan sosial yang rasional untuk membenarkan suatu bentuk program reformasi.

a. Anarkisme

Para reformer dan pemikir Perancis mengembangkan ide bahwa penghalang kemajuan sosial adalah pemerintah. Kemajuan hanya dapat terjadi apabila pemerintah dihilangkan; akibat yang ditimbulkan adalah anarki. Tujuan mereka adalah pencapaian masyarakat utopia.

b. Marxisme

Karl Mark berada secara langsung dalam tradisi evolusioner. Ia menganggap pemerintah yang mengendalikan kaum kapitalis. Bagi Marx, perubahan sosial hanyalah sarana untuk mencapai stabilitas sosial pada tingkat utopia.

c. Sosialisme Fabian

Teori sosialis fabian paling dekat dengan teori Marxisme. Mereka berpendapat bahwa transisi dari kapitalisme ke sosialisme dilakukan secara bertahap dan sepotong-potong.

d. Reformisme Moralistik

Penganut reformasi ini memiliki keyakinan pada kekuatan kelompok minoritas yang terorganisasikan untuk melakukan perubahan sosial. Mereka juga memiliki dasar moral yang membenarkan pergerakan tersebut. Pergerakan ini berpusat di gereja, tetapi tetap berada di luar arena perselisihan sosial yang terorganisasikan. Pergerakan ini jarang terpikirkan hasilnya dan bahkan menimbulkan masalah yang lebih besar dari yang mereka pecahkan.

3. Teori Perubahan Siklus

Evolusionis termasuk Marx menampilkan fakta-fakta yang dipilih dari perkembangan sejarah atau untuk membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat Barat yang kontemporer. Tingkat perubahan sosial sangat berbeda dari masyarakat ke masyarakat yang lain, dari waktu ke waktu dalam masyarakat tertentu. Demikian juga arah perubahan yang terjadi juga berbeda-beda.

4. Teori Sejarah

Antitesis terhadap teori bahwa perubahan sosial menuju ke arah kesempurnaan adalah kuno dan menimbulkan ide bahwa perubahan sosial tidak menuju kesempurnaan tetapi menuju kepunahan. Muncul dan menurunnya peradaban di masa lalu dapat disamakan dengan siklus hidup, manusia lahir, tumbuh dewasa, tua dan mati. Teori dapat didiskreditkan oleh berbagai bukti yang mendasarinya, karena catatan sejarah mengindikasikan bahwa peradaban naik turun, tetapi dengan cara yang tidak konsisten, memiliki banyak tempat dan bagian dalam setiap peradaban. Bacaan penutup dari catatan sejarah memberi kesan tidak adanya banyak siklus sejarah, tetapi siklus dalam siklus di mana

masing-masing siklus masih ada siklus-siklus yang lebih kecil.

5. Sosiologi dan perubahan sosial

Para sosiolog Amerika mengatakan bahwa kekuatan yang membuat perubahan sosial semuanya berada pada masa sekarang, sehingga melalui studi masa kini, segala sesuatunya akan diketahui masa lalu dan masa depan. Evolusionis abad 19 berasumsi bahwa perubahan sosial terjadi melalui proses yang dibangun masyarakat secara melekat. Berbeda dengan para sosiolog abad 20 yang menganggap penemuan-penemuan baru adalah bukti bahwa masyarakat menghasilkan inovasi dan muncul sebagai produk sosial.

Dekadensi moral dan instabilitas sosial telah menjadi salah satu karakteristik yang melekat pada masyarakat Barat jika dibandingkan dengan peradaban lain yang ada saat ini. Kriminalitas, ketidakamanan, kekerasan, kehancuran pola rumah tangga, dan penyalahgunaan zat adiktif telah merata (Mowlana, 2010 :35).

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat bersifat *asocial* karena perubahan bukan merupakan produk masyarakat dan perubahan yang terjadi cenderung menjauhkan keterikatan psikologi dan sosial antar setiap individu masyarakat. Perubahan sosial tidak setara dengan perubahan yang terjadi pada organisme hidup. Perubahan terjadi dalam masyarakat jauh lebih setara dengan pelanggaran proses organik yang normal. Kekuatan yang membuat perubahan sosial bersifat abnormal, pelanggaran proses normal di mana sistem sosial diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Di masa yang akan datang, akan banyak timbul masalah-masalah sosial. Diantaranya adalah problem pengangguran. Dari laporan yang dilakukan oleh Roosmalawati Rusman (1997 : 205), tercatat bahwa ada 7,7 % penduduk sedang mencari kerja. Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 1994 tersebut mengemukakan bahwa presentasi pencari kerja dari tamatan SLTA adalah yang tertinggi, dan kemudian tamatan SD ke bawah. Hal ini berarti proses pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia harus lebih diperbaiki lagi. Kesempatan orang untuk menimba ilmu di perguruan tinggi harus lebih dibuka selebar-lebarnya. Bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu, maka pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan harus menyediakan beasiswa khusus.

Begitu juga lembaga-lembaga donor seperti Badan Amil Zakat baik yang dibawah pemerintah maupun swasta harus lebih memperhatikan lagi masalah sosial ini khususnya pengangguran.

Pendidikan dalam Perspektif Perubahan Sosial

Pendidikan sebagai suatu proses yang mengubah perilaku individu dalam konteks teori perubahan sosial akan mempunyai dampak terjadinya perubahan baik pada tingkat individu sebagai agen maupun tingkat kelembagaan yang mampu mengubah struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Pendidikan dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat dan sebaliknya, jika masyarakat mengalami perubahan, secara tidak langsung sistem pendidikan juga mengalami perubahan.

Arah pembangunan di bidang pendidikan sangat ditentukan oleh tuntutan masyarakat sesuai dengan kebudayaan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peranan penting karena daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor terjadinya tuntutan penerapan desentralisasi pendidikan, antara lain :

1. Tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, bisnis dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan penilaian pendidikan.
2. Adanya anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa.
3. Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.
4. Penampilan fisik sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat.
5. Tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan pendanaan dari privatisasi.

Di samping beberapa faktor tersebut, terdapat beberapa faktor yang lain tentang desentralisasi pendidikan di Indonesia. Beberapa faktor tersebut antara lain :

1. Terjadinya tuntutan reformasi di segala bidang termasuk bidang pendidikan.
2. Kurangnya persaingan antar daerah dalam memajukan pendidikan karena tuntutan nasional yang seragam.
3. Tuntutan masyarakat untuk mandiri sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan dan memajukan bidang pendidikan.
4. Ketidaksiuaian tuntutan nasional dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
5. Adanya ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
6. Kurangnya kreativitas daerah, sekolah dan personil penyelenggara.

Persoalah tentang desentralisasi tersebut di atas adalah salah satu persoalan yang muncul dalam dunia global. Selanjutnya Emil Salim (1990 : 75) memberikan solusi alternatif untuk meminimalisir permasalahan di atas, yaitu dengan mengatakan bahwa kalau kita ingin membangun kemajuan dan kesejahteraan negara dan bangsa kita, maka kita tidak boleh ragu-ragu untuk melihat secara lugas dan berani kepada kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Masalah pendidikan adalah masalah yang paling mendasar nantinya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut.

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pada pasal 1,2,3 dalam ayat-ayat tersebut dapat diartikan bahwa penyelenggara pendidikan berkembang sesuai dengan perkembangan daerah masing-masing, baik dalam hal pendanaan, manajemen, kurikulum dan sistem evaluasinya. PBM (Pendidikan Berbasis Masyarakat) dimaknai sesuai dengan pemahaman masing-masing daerah berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Beberapa asumsi penting dapat dijadikan landasan PBM. Asumsi-asumsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan harus dipandang sebagai suatu bentuk keberlanjutan sejak usia prasekolah hingga melalui proses pendidikan sepanjang hayat.
2. Belajar adalah apa yang kita lakukan untuk kita sendiri. Oleh sebab itu si pembelajar harus sadar keterlibatannya dalam proses pembelajaran.
3. Pekerjaan di masa mendatang tidak hanya memerlukan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi namun juga memerlukan latar belakang yang berbeda termasuk di dalamnya yang mampu membelajarkan cara belajar kritis, membangun sebuah tim, serta kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan.

4. Orang dewasa perlu terlibat dalam urusan masyarakat serta memberikan perhatian seimbang kepada pekerjaan, keluarga dan masyarakat.
5. Masalah-masalah yang dapat diatasi sekolah. Oleh karena itu keterlibatan keluarga, dunia kerja, masyarakat serta pihak-pihak lain yang terkait menjadi sangat penting.

Penutup

Perubahan sosial adalah hal yang niscaya terjadi, cepat atau lambat, perubahan yang bersifat positif atau negatif atau perubahan lainnya. Perubahan adalah sesuatu yang patut kita syukuri sekaligus kita waspadai karena perubahan yang bersifat positif akan berdampak memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi umat manusia, sedangkan perubahan negatif justru sebaliknya, yakni menghancurkan peradaban manusia.

Lembaga pendidikan harus bersikap waspada terhadap efek negatif dari perubahan sosial. Jangan sampai lembaga pendidikan tidak siap lalu mengorbankan para peserta didiknya. Kemajuan teknologi yang diusung oleh peradaban manusia kontemporer, maka harus dikuasai oleh para *stakeholder* lembaga pendidikan. Para peserta didik saat ini sudah terbiasa dengan sentuhan teknologi dalam kehidupan kesehariannya. Maka dari itu jika lembaga pendidikan tidak diimbangi dengan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan belajar-mengajar yang mereka selenggarakan, maka peserta didik akan menjadi mudah bosan dan berakibat pada menurunnya minat peserta didik untuk belajar. Untuk pelarian dari kebosanan mereka, maka ada yang menyalurkannya untuk hal positif dan ada pula yang menyalurkannya pada aspek negatif. Berarti secara tidak langsung lembaga pendidikan yang tidak siap terhadap perubahan sosial juga menjerumuskan peserta didiknya ke dalam kehidupan hedonis di masa yang akan datang.

Kedua hal, yakni pendidikan dan perubahan sosial merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan sangat berkaitan antara satu dengan yang lain karena pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan sekaligus menentukan arah perubahan sosial yang disebut dengan pembangunan masyarakat. Sedangkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dirancang sesuai dengan arah perubahan, tetapi perubahan juga terjadi setiap saat tanpa dirancang karena pengaruh budaya dari luar.

Pendidikan adalah upaya yang sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu agar dapat menentukan kehidupan secara mandiri. Pendidikan didefinisikan oleh siapapun menurut aliran manapun dapat dianalisis berdasarkan suatu sistem. Analisis terhadap sistem pendidikan dapat dilakukan dari *input*, *output* dan *outcome*, di mana *input* sangat menentukan proses pendidikan dan proses akan menentukan *output* pendidikan. *Outcome* berpengaruh terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal di mana ketiga jalur tersebut saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan sebagai suatu proses yang dapat mengubah perilaku individu dalam konteks perubahan sosial akan mempunyai dampak terjadinya perubahan baik pada tingkat individu sebagai agen maupun tingkat kelembagaan yang mampu mengubah struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Kajian terhadap perubahan sosial yang ditimbulkan oleh proses pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal dapat dianalisis berdasarkan kacamata teori sosiologi secara timbal balik.

Daftar Pustaka

- Arief, Armaei. 2005. *Reformulasi Pendidikan Islam*. Jakarta : CRSD Press.
- Dhoifier, Zamakhsary. 1994. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta : LP3ES.
- <http://fungsipendidikandalamperubahansosial.blogspot.com/>
- Mowlana, Hamid. 2010. *Masyarakat Madani; Konsep, Sejarah dan Agenda Politik*. Jakarta : Shadra Press.
- Mukti, Abd.. 2008. *Pembaharuan Lembaga Pendidikan di Mesir; Studi tentang Sekolah-Sekolah*. Bandung : Cita Pustaka Media Perintis.
- Nata, Abudin. 2006. *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : UIN Jakarta Press.
- Rosman, Roosmalawati dalam *Dinamika Sosial Pemuda di Perkotaan*, penyunting: Riwanto Tirtosudarmo, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Salim, Emil, dalam *Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI*, disampaikan dalam Simposium Nasional Cendekiawan Muslim, penerbit ICMI, Jakarta, 1990.

Saridjo, Marwan. 2010. *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa; Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani.

Yasmadi. 2002. *Moderinsasi Pesantren; Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta : Ciputat Press.

Zarkasyi, Abdullah Syukri. 2005. *Manajemen Pesantren; Pengalaman Pondok Modern Gontor*. Ponorogo : Trimurti Press.